



Kebijakan Luar Negeri Inggris : Studi kasus Penjualan Senjata Inggris ke Arab Saudi

Eugenius George Paganio

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website:<http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The relationship between Britain and Saudi Arabia has been going on for a long period, where the cooperation is in the fields of economy, security, technology, or resources. One of Britain's cooperation with Saudi Arabia is the field of arms trade. However, this has become a problem lately because these weapons were used by Saudi Arabia to commit crimes against humanity and peace, particularly Saudi Arabia's involvement in the conflict in Yemen. The research objective is to find out the factors that influence British policy to continue selling weapons to Saudi Arabia using the concept of Foreign Policy Decision Making. The concept is collaborated with data using qualitative explanative research methodology. Researchers found that there are several factors that influence British foreign policy to continue selling weapons to Saudi Arabia. These factors are the political conditions in the UK in which there is the influence of Theresa May as prime minister and interest actors namely arms companies that maintain connections and relations with government. The second factor is the economic factor, where the British dependence on weapons projects. And the last factor is a political factor regarding the British agenda with the Gulf State.

Keywords : *Cooperation, Arms Trade, Foreign Policy*

PENDAHULUAN

Hubungan Inggris dan Arab Saudi sudah terjalin cukup lama dan berlangsung selama seabad terakhir. Pada masa kontemporer ini, hubungan tersebut berpola simbiosis dimana masing-masing pihak saling bekerja sama dalam berbagai kepentingan serta mengambil keuntungan yang didapatkan. Kerjasama yang dijalankan kedua pihak berupa kerjasama dalam bidang ekonomi, keamanan, teknologi, ataupun sumberdaya. Salah satu kerjasama Inggris Arab Saudi adalah bidang perdagangan senjata. Statistik menunjukkan bahwa Inggris adalah salah satu negara yang memberika suplai peralatan militer kepada Arab Saudi, dan menjadikan Arab Saudi sebagai pasar prioritas dengan lisensi untuk ekspor senjata ke Negara tersebut, termasuk ekspor pesawat tempur dan bom udara (The Guardian, 2015). Pada dasarnya, penjualan senjata Inggris ke Arab Saudi diperbolehkan, namun menjadi masalah belakangan ini karena dikarenakan senjata tersebut digunakan oleh Arab Saudi untuk melakukan tindakan kejahatan kemanusiaan dan perdamaian, khususnya keterlibatan Arab Saudi dalam konflik yang terjadi di Yaman. Konflik Yaman muncul seiring dengan fenomena *Arab Spring* yang terjadi di Timur Tengah. Perpecahan yang berujung perang saudara tersebut meluas menjadi konflik internasional yang ditandai dengan keterlibatan beberapa aktor seperti Arab Saudi, Iran, dan *Al-Qaeda* (BBC, 2018). Keterlibatan Arab Saudi dalam konflik domestik yang berada di Yaman mendapat kecaman dari dunia internasional.

Operasi militer oleh Arab Saudi, dalam beberapa kasus melanggar HAM dan kejahatan kemanusiaan dikarenakan dampak *colateral damage* yang ditimbulkan dari korban sipil dan infrastruktur penting di Yaman dengan menggunakan senjata buatan Inggris. Problematikanya disini bahwa Inggris salah satu negara pelopor serta negara anggota yang meratifikasi ATT. *Arms Trade Treaty* (ATT) adalah sebuah perjanjian multilateral untuk menetapkan standard pengaturan perdagangan senjata konvensional. Inggris secara resmi memasukan ATT dalam undang-undang negaranya pada tanggal 2 April 2014. Pasal 6.3 dalam ATT menyebutkan bahwa negara pihak dilarang mengizinkan penjualan senjata yang digunakan untuk genosida, kejahatan kemanusiaan, ataupun berbagai tindakan yang melanggar Konvensi Jenewa tahun 1949. Penjualan senjata ke Arab Saudi menjadi kontradiktif dengan kebijakan Inggris yang meratifikasi ATT.

Untuk menemukan motif Inggris tetap menjual senjata ke Arab Saudi, penelitian ini menggunakan teori milik William Coplin yang menggagas teori kebijakan luar negeri. Dalam arena kebijakan luar negeri, pengambilan keputusan mewakili wilayah tindakan pemerintah di mana kepentingan domestik dan asing saling berkaitan. Gagasan Coplin menganggap bahwa negara akan berperilaku berdasarkan faktor yang menjadi pendorong dalam bertindak atau menerapkan kebijakan yang sesuaikan dengan kepentingan mereka. Latar belakang yang menjadi alasan kebijakan tersebut dipilih, yang menjadi penekanan analisis Coplin dalam penentuan pembuatan kebijakan luar negeri. Secara umum, Coplin membagi menjadi 4 aspek yang melatarbelakangi pembuatan keputusan yaitu kondisi politik dalam negeri, kapabilitas militer dan ekonomi negara, konteks internasional dan yang terakhir adalah arah dan kebijakan pengambil keputusan (Coplin, 1992). Aspek tersebut menjadi hal yang paling determinan dalam menentukan pembuatan kebijakan luar negeri. Penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka dalam mengumpulakan data sekunder yang didapatkan dari buku, literatur, jurnal, artikel berita, dan sumber dunia maya.

PEMBAHASAN

Rekam jejak hubungan kedua negara tersebut, yang ditandai dengan berbagai kerjasama dalam berbagai bidang. Salah satu kerjasama tersebut adalah mengenai transaksi penjualan senjata. Sebagai negara dengan Industri Pertahanan yang maju, tentu Inggris akan mencari pelanggan dari negara lain. Pendistribusian senjata Inggris di masa kontemporer ini berkembang apabila dibandingkan masa sebelumnya, yang ditandai dengan pembaruan sistem serta teknologi senjata dan pasar dari negara dan wilayah lain. Untuk mengatur perdagangan senjata tersebut, Inggris dalam hal ini mempunyai pilar dalam pemerintahan yaitu *Department of International Trade*¹. DIT memberlakukan lisensi dalam penjualan senjata yaitu *Individual License*. *Individual License* ini terbagi dalam 2 kategori yaitu *Open Individual Export Licenses* dan *Standar Individual Export Licenses*.

¹ Department for International Trade adalah Departemen di Pemerintahan Inggris yang menanganai perjanjian dagang Inggris dengan negara-negara lain, yang dibentuk oleh Theresa May setelah Inggris keluar dari Uni Eropa pada 2016

Tabel 1.1 Lisensi Penjualan Senjata

<i>Open Individual Export Licenses</i>	<i>Standard Individual Export Licenses</i>
OIELS adalah lisensi yang diberikan kepada Eksportir baik individu ataupun swasta yang mencakup berbagai pengiriman barang, tanpa ada batas jumlah ataupun nilai dengan jangka waktu 5 tahun sejak tanggal penerbitan	SIELS yaitu lisensi yang diberikan kepada individu atau pihak Eksportir dengan batasan nilai dan jumlah. Jangka waktu untuk lisensi ini akan berakhir, dengan batas 2 tahun atau apabila jumlah atau nilai telah tercapai.

Sumber : Gov.uk, 2016

Setiap pihak eksportir berada dalam pengawasan ECJU (*Export Control Joint Unit*) yang merupakan satuan tugas yang terdiri dari 3 Departemen dan berada di bawah naungan DIT. Negara dalam hal ini memfasilitasi perusahaan senjata dengan memberikan lisensi. Lisensi tersebut secara garis besar memberikan kesempatan pihak eksportir untuk menjual barang ke berbagai pasar International. Timur Tengah adalah pasar utama untuk ekspor pertahanan Inggris bila dibandingkan dengan pasar yang lain, dan Arab Saudi adalah pembeli terbesar senjata Inggris. Menurut pusat data pengiriman senjata SIPRI, Inggris adalah pengekspor senjata terbesar kedua ke Arab Saudi (setelah Amerika Serikat) antara 2010 dan 2018, dan lebih besar dari gabungan semua negara lain. Inggris menyumbang sekitar 21% dari impor senjata ke Arab Saudi (Louisa, 2019). Sejak 2015 sampai 2018 Arab Saudi adalah importir senjata terbesar dari Inggris yang bernilai total 5.3 Miliar *Poundsterling*. Data tersebut menunjukkan bahwa, pasar utama Inggris berada di Timur Tengah terutama Arab Saudi.

Penjualan senjata Inggris ke Arab Saudi menjadi problematika International, karena penggunaan senjata Inggris oleh Arab Saudi di konflik Yaman. Koalisi yang dipimpin Arab Saudi memulai operasi militer, segera setelah permintaan bantuan dari Mansour Hadi. Keterlibatan Arab Saudi disini semakin memperburuk konflik, dimana yang pada awalnya konflik internal Yaman, menjadi konflik Internasional yang berujung pada bencana kemanusiaan. Beberapa operasi militer oleh koalisi yang dipimpin Arab Saudi banyak menimbulkan korban sipil. Lebih dari 8.600 serangan udara antara Maret 2015, ketika kampanye yang dipimpin Saudi dimulai, sampai akhir Agustus tahun ini. Dari total jumlah tersebut, 3.577 diantaranya menyerang situs militer dan 3.158 menyerang situs non-militer (The Guardian, 2016).

Serangan militer koalisi, beberapa kali menyerang infrastruktur penting seperti serangan di pelabuhan pada 2016, sehingga memotong suplai bahan baku penting seperti makanan dan obat-obatan bencana kelaparan dan penyakit. Fakta diatas menunjukkan bahwa Arab Saudi telah melanggar Konvensi Jenewa 1949 tentang perlindungan orang sipil, termasuk perlindungan terhadap properti sipil yang tercantum dalam protokol tambahan tahun 1977. Penggunaan senjata Inggris dalam konflik Yaman disini, menunjukkan inkonsistensi Inggris sebagai negara pelopor dan anggota peratifikasi *Arms Trade Treaty* (ATT). Padahal dalam pasal 6.3 disebutkan pelarangan pemberian otorisasi kepada pihak yang menjual senjata ke pihak yang melakukan kejahatan kemanusiaan atau apapun yang berkaitan dengan Konvensi Jenewa 1949.

Penelitian ini ingin menemukan faktor yang menyebabkan Inggris tetap menerapkan kebijakan luar negeri untuk tetap menjual senjata ke Arab Saudi. Dengan menggunakan gagasan milik Coplin, peneliti menemukan beberapa unsur yang menjadi faktor pendorong Inggris tetap menjual senjata ke Arab Saudi. Pemerintah Inggris menyediakan berbagai macam fasilitas layanan dalam mendukung penjualan senjata. Mulai dari bantuan kepada perusahaan senjata yang menghadiri pameran senjata, melalui dukungan finansial untuk

transaksi individu, hingga porsi waktu yang diberikan kepada atase pertahanan yang bertugas di kedutaan yang dihabiskan untuk mempromosikan ekspor senjata Inggris. Selain itu Perdana Menteri, sering melakukan kunjungan kenegaraan untuk melakukan perjalanan bisnis yang dibalut kunjungan diplomasi yakni dengan promosi serta mendorong kepala negara lain untuk membeli senjata produksi Inggris. Ditambah lagi dengan keluarnya Inggris dari Uni Eropa sehingga memaksa Theresa May pada waktu itu mengambil tindakan dengan memperkuat kembali prospek perdagangan dan investasi Inggris di Negara Teluk. Pada pidato bulan Desember tahun 2016 di depan kepala negara-negara Teluk, mengimplikasikan bahwa dengan keluarnya Inggris dari Uni Eropa, akan membangun peraturan perdagangan dengan negara-negara teluk. Pertemuan setelah pidato tersebut antara Theresa May dengan negara-negara teluk, menyatakan bahwa ketika Inggris meninggalkan Uni Eropa, akan membangun hubungan ekonomi dan bekerja sama dalam menghilangkan hambatan dalam Perdagangan dan Investasi (Gov.uk, 2016).

Theresa May pun membentuk DIT dimana kewenangan DIT disini memberikan lisensi untuk eksport senjata, pesawat dan bom, sebagai langkah untuk mengembangkan perdangan senjata Inggris. Lapisan masyarakat Inggris yang tergabung dalam organisasi HAM, ataupun kampanye melawan perpindahan senjata, menekan Theresa May untuk melaksanakan peninjauan kembali mengenai penjualan senjata ke Arab Saudi. Namun upaya tersebut ditandai dengan kegagalan yang ditandai dengan kekalahan dalam pengadilan pada tahun 2017, serta pada tahun yang sama di bulan Maret, Theresa May menyetujui kesepakatan lebih lanjut senilai £ 65 miliar selama beberapa tahun ke depan, dan juga penandatanganan Letter of Intent untuk Arab Saudi mengenai pembelian 48 pesawat Typhon (Independent, 2018).

Kondisi politik dalam negeri menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pemerintah dalam pengambilan kebijakan karena kondisi politik langsung berhubungan dengan pemegang kebijakan. Pengaruh politik perusahaan militer sering kali dianggap sebagai faktor yang signifikan, bahkan dominan, dalam perdagangan senjata. Hal ini yang perlu diperhatikan adalah aktor-aktor yang mempengaruhi kebijakan tersebut. Penulis mengkaji aktor-aktor yang berhubungan dengan pemegang kebijakan tersebut dan menemukan beberapa analisis, yang menunjukkan bahwa aktor-aktor tersebut berasal dari perusahaan pertahanan ataupun perusahaan yang bergerak dalam teknologi senjata. Industri pertahanan Inggris memandang pemerintah sebagai pelanggan utama, pembentuk regulasi dan juga sebagai pemodal untuk industri pertahanan, karena posisi pemerintah langsung memengaruhi struktur, aktivitas, dan performa negara. Ini berarti dapat diasumsikan bahwa negara mempunyai peran krusial dalam pilihan strategis industri pertahanan kaitannya menghadapi dengan berbagai restriksi dan perubahan teknologi. Ada beberapa celah yang digunakan oleh aktor tersebut untuk mendapatkan akses untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Dalam kasus penjualan senjata Inggris ke Arab Saudi, aktor-aktor yang mempengaruhi kebijakan tersebut adalah orang-orang industri pertahanan yang mempunyai koneksi dan hubungan tradisional dengan pemerintah. Manuver yang dilakukan oleh aktor tersebut untuk mempertahankan koneksi mereka dengan pemerintah adalah dengan melakukan *Revolving Doors*² dan juga mengadakan pertemuan dengan pemerintahan. Namun disini, mengenai pola hubungan antara pemerintah dengan perusahaan senjata tidak digambarkan secara sederhana dengan aktor perusahaan senjata mempengaruhi pemerintah

² Istilah "*Revolving Doors*" mengacu pada perpindahan karyawan tingkat tinggi dari pekerjaan sektor publik ke pekerjaan sektor swasta, dan sebaliknya. (Investopedia, 2019)

kemudian otomatis penjualan senjata tetap berjalan. Tetapi peneliti melihat adanya hubungan transaksional antara pemerintah dengan perusahaan senjata, yang memanfaatkan kebijakan penjualan senjata tersebut. Pola hubungan tersebut diwarnai dengan hubungan transaksional dimana kedua belah pihak saling mendapatkan keuntungan dari bisnis penjualan senjata tersebut. Bagi pemerintah, keuntungan yang didapatkan bisa berupa mendapatkan jaminan pekerjaan di perusahaan senjata. Pasca-Brexit, sekelompok menteri, beberapa penasihat dan mungkin juga pejabat tinggi, telah mengakhiri masa jabatan di pemerintah. Namun, masa depan mereka telah terjamin, yakni jalur yang dilalui dari sektor publik ke sektor swasta, memastikan mereka untuk mencari keuntungan dari waktu mereka di pemerintahan, yang dibayar dengan pekerjaan yang menguntungkan di dunia bisnis. Tren ini telah menjadi tradisi di pemerintah Inggris sejak masa 1990-an pada kepemimpinan Margaret Thatcher (Lambert, 2003). Selain itu, investigasi yang dilakukan oleh *The Guardian* menemukan bahwa ada beberapa pejabat tinggi di pemerintah yang mempunyai saham di industri pertahanan Inggris (The Guardian, 2019). Hal ini dapat disimpulkan bahwa pegawai tersebut mengambil keuntungan dari bisnis tersebut, dan melakukan berbagai upaya agar dapat mempertahankan kelanjutan dari bisnis tersebut. *The Ferret Journalism* juga menemukan bahwa, beberapa pegawai pemerintah mendapatkan suap dalam bentuk uang, hadiah ataupun sebatas makan malam (The Ferret, 2019).

Kemudian keuntungan yang didapatkan perusahaan senjata dalam mempertahankan hubungan dengan pemerintah. Industri pertahanan Inggris diberikan akses langsung ke jantung pemerintah dengan mengirimkan pegawai mereka untuk bekerja di jantung pemerintah yang menangani penjualan senjata. Contoh adalah pada tahun 2017 *The Guardian* menemukan bahwa setengah pegawai dari DIT merupakan bekas pegawai perusahaan senjata (The Guardian, 2017). Hal ini menjadi keuntungan bagi perusahaan senjata karena DIT mempunyai kewenangan untuk memberikan lisensi untuk ekspor senjata. Industri pertahanan Inggris juga mendapat keuntungan dengan menunjuk eksekutif yang merupakan mantan pejabat tinggi, yang dimana dengan pengetahuan aktor tersebut, Industri pertahanan dapat mengetahui pendekatan pemerintah mengenai kebijakan pemerintah dalam menjual senjata. Pemerintah sering memfasilitasi bisnis penjualan senjata tersebut dengan mempromosikan senjata dengan negara lain melalui berbagai acara pameran penjualan senjata yang dimana negara-negara pembeli diundang dalam acara tersebut. Sebagai Contoh adalah DSEI *Arms Fair*, dimana dalam festival tersebut, negara memfasilitasi acara tersebut serta mengundang tamu dari mancanegara (StopWar, 2017.)

Fenomena ini berfungsi untuk menciptakan jaringan yang dapat menguatkan diri di persimpangan negara, militer, dan industri senjata, semuanya didedikasikan untuk kelanjutan dari bisnis penjualan senjata (Wearing, 2016). Dalam gagasan Coplin disebutkan bahwa faktor kondisi politik domestik mengacu kepada pola hubungan antara aktor yang berkepentingan dengan si pembuat kebijakan. Dalam hal ini peneliti melihat adanya lingkaran hubungan antara pemerintah dengan perusahaan senjata yang dimana kedua pihak memanfaatkan kebijakan penjualan senjata tersebut. Para eksekutif dari perusahaan komersial telah dimasukkan ke dalam jantung departemen pemerintah sebagai akses perusahaan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Contoh kasus terjadi ketika mantan Duta Besar Inggris untuk Arab Saudi, Sir Sherard Cowper-Coles, pindah ke BAE Systems. Sebagai Duta Besar, ia telah menekan *Serious Fraud Office* untuk menghentikan penyelidikan dalam perjanjian senjata BAE-Saudi yang diduga ada korupsi (Wearing, 2016). Tradisi hubungan kuat antara oknum pemerintah dengan perusahaan senjata ini yang menjadi faktor pendorong mengenai kondisi politik domestik Inggris yang hanya dikuasai oleh sekelompok elit yang mempunyai kepentingan dalam memanfaatkan kebijakan penjualan senjata. Akibatnya, karena berbagai kepentingan individu atau suatu kelompok, kebijakan yang dibentuk, di sesuaikan dengan porsi keuntungan bagi aktor-aktor yang memainkan

peran di bisnis tersebut, dengan catatan tanpa mempertimbangkan opini publik. Kebijakan-kebijakan tersebut terlihat karena banyak menciptakan kontroversi, dan berlawanan dengan keinginan lapisan masyarakat.

Selain pola hubungan seperti yang dijelaskan sebelumnya, pemerintah dengan perusahaan senjata sering melakukan berbagai pertemuan. Jumlah pertemuan yang diiringi dengan tingkat akses yang didapatkan adalah suatu bentuk manifestasi yang jelas dari hubungan dekat antara industri senjata dengan pemerintah Inggris. Akses khusus yang diberikan kepada industri pertahanan, secara berkala pada akhirnya mengikis serta mengganti jalur prioritas pemerintah. Total ada 72 perusahaan industri pertahanan yang melaksanakan pertemuan dengan pemerintah Inggris. Variasi pertemuan tersebut beraneka ragam, namun relatif terlihat dengan lobi yang dilakukan oleh industri pertahanan. Pertemuan tersebut mencakup kampanye penjualan, pengadaan senjata oleh Kementrian, makan malam formal, pertemuan rutin, dimana semua hal tersebut dibalut dengan pertemuan formal antar pejabat tinggi untuk meminimalisir kritik publik. Contoh kasus yang adalah pertemuan yang diadakan oleh Alan Johnson mantan Sekretaris Partai Buruh, pada tanggal 24 January 2019. Pertemuan tersebut dikritik oleh lapisan masyarakat Inggris karena, yang menghadiri pertemuan tersebut mayoritas berisi orang-orang dari Industri Pertahanan serta sekutunya perusahaan senjata yang tergabung dalam kelompok ADS (*Aerospace, Defence, and Security*), yang merupakan wadah perdangan untuk perusahaan senjata. Pertemuan tersebut membuka kesempatan bukan hanya untuk memperkuat hubungan diantara kalangan internal, namun juga mencari cara untuk mendapatkan pengaruh di pemerintahan khususnya dalam pembuatan kebijakan. Dari kelompok ADS tersebut relatif adalah perusahaan teknologi senjata yang menjadi langganan Arab Saudi, seperti *Bae System, Rolls Royce, Lockheed Martin* dan beberapa perusahaan yang lain. Perusahaan tersebut mempunyai rekam jejak sebagai penjual senjata terhadap rezim yang melanggar HAM, seperti Arab Saudi. Rona Fairhead, Menteri untuk urusan Perdagangan dan Promosi, turut hadir dalam pertemuan tersebut. Fairhead bekerja bersama Liam Fox, dalam strategi ekspor Inggris, dan mempunyai ambisi untuk meningkatkan keuntungan ekspor Inggris dari 30% menjadi 35% dari total GDP Inggris.

Mengacu kepada pola hubungan antara oknum pemerintah dengan perusahaan senjata diatas, peneliti menyimpulkan bahwa, perusahaan senjata tidak secara langsung mempengaruhi, tetapi dengan cara menyenangkan dan memberikan kenyamanan kepada pemerintah, sehingga pemerintah tetap memberlakukan penjualan senjata ke Arab Saudi. Perusahaan senjata pun membutuhkan pasar sehingga mereka mempertahankan koneksi dengan pemerintah untuk mempromosikan dan menjual senjata dengan bantuan Theresa May beserta rekan-rekannya. Bob Keen, kepala hubungan pemerintah di *Bae System* mengatakan bahwa tidak mungkin untuk melakukan kesepakatan tanpa adanya dukungan pemerintah.

Dari segi kapabilitas militer, tentu sudah disebutkan sebelumnya dari data ekspor senjata Inggris menunjukkan bahwa Inggris mempunyai kemampuan untuk menciptakan kekuatan militer. Kemampuan Inggris dalam produksi teknologi militer menempatkan negara tersebut sebagai penyuplai senjata terbesar kedua setelah Amerika Serikat menurut data yang dikumpulkan oleh SIPRI. Menurut data yang dikumpulkan oleh SIPRI, Inggris telah menempati 10 besar negara eksportir senjata terbesar, yang dimana 49 % dari total ekspor senjata tersebut dikirim ke Arab Saudi (SIPRI, 2019). Kekuatan militer Inggris bukan hanya berdasarkan kuantitas dari militernya, tetapi juga kemampuan Inggris dalam produksi teknologi senjata. Berikut adalah beberapa produksi senjata Inggris pada masa 2010-2-2018. Kemampuan Inggris dalam memproduksi senjata menyebabkan Inggris harus gencar dalam mempromosikan senjata tersebut ke mancanegara. Inggris harus bisa mencari pasar, apalagi ditambah dengan keluarnya dari Uni Eropa. Akhirnya untuk mengantisipasi hal tersebut,

pada tahun 2016 Theresa May membentuk 5 pilar bisnis dan mengundang mereka untuk membicarakan arah kebijakan Inggris setelah Brexit dan mengkaji kesempatan-kesempatan yang ada dalam mencapai kepentingan. Pada pertemuan tersebut, dihadiri oleh Kepala *Bae System* Roger Carr dan juga Ian Davis Kepala perusahaan *Rolls Royce*. Pandangan yang muncul pada saat itu bahwa penjualan senjata adalah prioritas baru, dan arah kebijakan tersebut ditunjukkan dengan investasi yang besar di sektor penjualan senjata. Perjanjian dagang diluar pengawasan Uni Eropa berarti regulasi akan lebih sedikit yang menjadi pertanda baik bagi banyak aktor industri pertahanan dalam bisnis pembelian senjata. Pasar Uni Eropa sendiri tidak memberikan keuntungan yang cukup signifikan dimana hanya 8 % dari total keuntungan dari industri pertahanan (Noon, 2019). Angka tersebut tidak sebanding dengan kerjasama korporasi dengan negara Arab Saudi sebagai investor terbesar dalam Industri Pertahanan Inggris.

Namun dari sudut pandang ekonomi, manfaat ekonomi yang diperoleh Inggris, walaupun tidak terlalu berpengaruh namun tetap menjadi alasan pemerintah untuk tetap menjual senjata ke Arab Saudi. Pendapatan Inggris dari penjualan senjata selama sepuluh tahun terakhir terlihat fluktuatif. Nilai tertinggi pada tahun 2014, dan pada tahun 2018, semakin menurun sebesar 741 juta Dolar. Berikut adalah pendapatan Inggris dari penjualan senjata.

Gambar 3.2 Pendapatan Inggris dari Penjualan Senjata ke Arab Saudi



Sumber : Trading Economics

Data tersebut menunjukkan bahwa, pendapatan Inggris dari penjualan senjata cukup memberikan keuntungan untuk sektor perdagangan Inggris. Walaupun nilai yang fluktuatif, namun penjualan senjata tersebut cukup menjadi alasan Inggris tetap mempertahankan penjualan senjata dengan Arab Saudi.

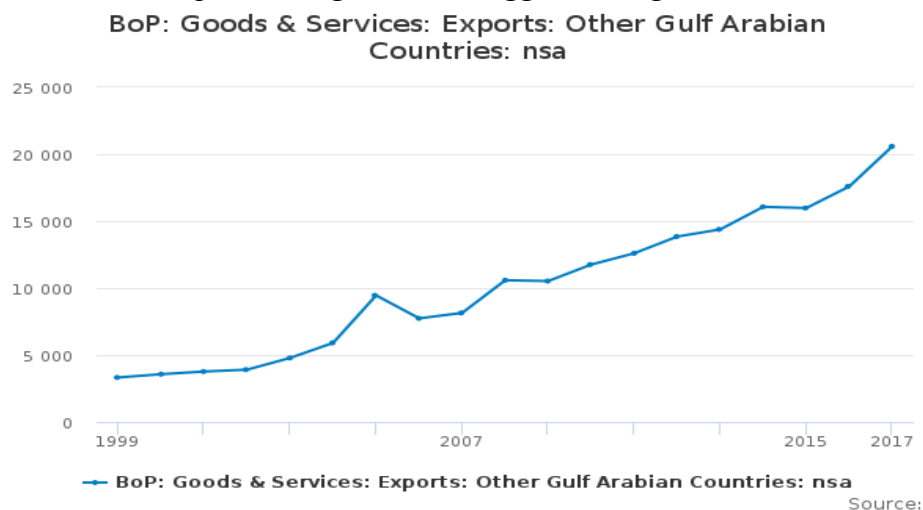
Faktor yang lain adalah mengenai keuntungan ekonomis Inggris dimana proyek senjata memberikan dampak kepada perekonomian Inggris. Faktor tersebut mengacu kepada fakta bahwa industri militer Inggris memberikan kesempatan kerja yang besar dalam bidang teknologi tinggi. Dr. Robert Dover dan Profesor Mark Phythian dari University of Leicester melakukan penelitian dan menemukan kesimpulan

The UK's defence industrial base is a valuable source of employment and technology driven enterprise for both the military and civilian sectors. The economic footprint of the defence industrial base runs across many industries, including forming an important part of the research and enterprise lives of the UK Higher Education sector (House of Common Report, 2016).

Industri pertahanan Inggris berada dalam posisi rentan karena memiliki peran penting dari segi keamanan dan skala ekonomis yakni dalam hal mempertahankan puluhan ribu pekerjaan, serta mengurangi pengeluaran biaya pertahanan dan mengurangi pembayaran pajak, serta mencapai kepentingan Inggris di konteks internasional (House of Common Report, 2016).

. Perkembangan *Arab Spring* di Timur Tengah mengakibatkan ketidakstabilan kondisi di wilayah. Seperti yang diungkapkan oleh Sir Simon Mayall pada pertemuan tahun 2016, yang membicarakan penggunaan senjata Inggris di Yaman oleh Arab Saudi yang mengimplikasikan bahwa ketidakstabilan yang berada di Timur Tengah, akan mengancam agenda dan kepentingan Inggris, khususnya dengan negara-negara Teluk. Pada September 2016, laporan yang tercantum dalam *House of Common Report* mengungkapkan pentingnya kestabilan Timur Tengah dengan kepentingan Inggris. Kepentingan Inggris disini yakni kepentingan ekonomi berupa perdagangan dan Investasi Inggris di Negara Teluk. Inggris telah mempunyai tren perdagangan dan Investasi di Negara Teluk telah cukup lama. Tren tersebut menurut data yang dikumpulkan oleh ONS berkembang dari tahun-ke tahun. Berikut adalah data dari ONS mengenai Nilai Ekspor Barang dan Jasa Inggris ke Negara Teluk.

Gambar 3.1 Nilai Ekspor Barang dan Jasa Inggris ke Negara Teluk tahun 1999-2017



Sumber : ONS, 2018

Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan dan kestabilan Negara Teluk sangat penting bagi kepentingan Inggris. Ancaman yang timbul seiring dengan munculnya *Arab Spring*, menuntut Inggris untuk mencari tindakan alternatif, sebagai upaya untuk melindungi kepentingan dengan negara-negara Teluk. Inggris segera memperkuat aliansi dengan negara-negara Teluk, sebagai langkah antisipasi dari ancaman yang ada.

Kebijakan yang diterapkan Inggris adalah dengan memperkuat kerjasama dengan Arab Saudi, seperti yang dinyatakan oleh Philip Dunne, Menteri Pertahanan Inggris :*“The Kingdom of Saudi Arabia, specifically, is an important member of the coalition..... It is very important to us that the stability of the region is maintained by encouraging military stability there”* (House of Common Report, 2016). Disinilah peran Ekspor senjata, dimana transfer senjata tersebut, sebagai langkah Inggris untuk mempertahankan pengaruh serta kepentingannya di Negara Teluk, melalui Arab Saudi. Ekspor senjata tersebut merupakan salah satu bentuk manifestasi memperkuat aliansi. Arab Saudi disini sebagai perpanjangan tangan Inggris untuk menghalau berbagai ancaman yang ada. Contoh kasus adalah pernyataan Desmond Swain, Menteri Departemen Pembangunan Internasional dimana masyarakat Inggris seharusnya lebih memperhatikan ancaman yang muncul dari Iran dan Pemberontak Houthi daripada membicarakan penggunaan senjata Inggris di Yaman. Secara

garis besar bisa disimpulkan bahwa, Arab Saudi (beserta dengan koalisinya) merupakan sarana Inggris untuk mempertahankan kepentingan Inggris, dengan cara membangun aliansi dan menjual senjata kepada negara-negara tersebut. Tentu ini lah yang menjadi alasan Theresa May membentuk DIT, dimana kewenangan DIT disini memberikan lisensi kepada perusahaan senjata untuk melakukan ekspor. Kesimpulannya, dari sudut pandang pemerintah, penjualan senjata ini memiliki nilai penting karena memainkan peran dalam mempertahankan industri senjata Inggris, yang pada gilirannya sangat diperlukan untuk mempertahankan status Inggris sebagai kekuatan militer global.

KESIMPULAN

Dalam penelitian ini, penulis menganalisis dengan dipandu teori kebijakan luar negeri dan menemukan beberapa faktor yang menjadi penyebab mengapa Inggris tetap menjual senjata ke Arab Saudi. Faktor yang pertama adalah berasal dari pembuat kebijakan, yaitu Theresa May. Theresa May disini, sadar dengan momentum pasca Brexit, sehingga arah kebijakan harus berubah, untuk mengantisipasi berbagai dinamika yang ada. Faktor yang kedua adalah kondisi politik dalam negeri. Pengaruh aktor-aktor yang berkepentingan dari industri pertahanan Inggris menggunakan koneksi mereka dengan pemerintah dengan melakukan berbagai manuver. Peneliti melihat bahwa baik pemerintah dengan aktor perusahaan senjata, menggunakan kebijakan penjualan senjata Inggris ke Arab Saudi, untuk mendapatkan keuntungan. Selanjutnya adalah faktor kapabilitas militer dan ekonomi. Untuk kapabilitas militer disini, Inggris mempunyai kapasitas untuk memproduksi teknologi militer. Tetapi hal tersebut berarti Inggris harus mencari pasar di dunia Internasional. Faktor ekonomi disini digambarkan dengan keuntungan yang diperoleh Inggris dari proyek-proyek kerjasama dalam bidang teknologi senjata militer, selain untuk mencapai agenda hubungan internasional, namun juga dapat mempertahankan industri senjata Inggris dengan memberikan lapangan kerja bagi masyarakat Inggris, serta membantu menekan biaya unit peralatan militer, dikarenakan adanya kebijakan pemotongan anggaran untuk alutista. Kemudian yang terakhir adalah faktor yang bersifat politis dimana, Inggris berusaha melindungi kepentingannya di Negara Teluk. Kepentingan Inggris dalam hal ini yakni arus perdagangan dan investasi Inggris dengan Negara teluk. Faktor-faktor tersebut yang menjadi pendorong Inggris untuk tetap menjual senjata ke Arab Saudi, walaupun sudah ditentang dan dikecam baik dari dalam dan luar negeri.

REFERENSI

- BBC News .(2018). *Yemen crisis: Who is fighting whom?* , dalam <<https://www.bbc.com/news/world-middle-east-29319423>> [diakses tanggal 13 september 2018]
- Brooks, Richard and Solomon Hughes. (2016). *Public Servants, Private Paydays : How ministers and mandarins make life after government pay-A Revolving Doors Special*. Private eye : 2016.
- CAAT. (2017). *The Arabian Connection*. Dalam <<https://www.caat.org.uk/resources/countries/saudi-arabia/arabian-connection#section16>> [diakses pada 3 Juli 2019]
- Coplin, W. D. (1992). *Introduction to International Politics, edisi Bahasa Indonesia Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis, edisi ke-2,*. Bandung: Sinar Baru.
- Data Ekspor Barang dan Jasa Inggris dalam <<https://www.ons.gov.uk/economy/nationalaccounts/balanceofpayments/timeseries/erdi/mret>> [diakses pada 4 September 2019]
- Data pendapat penjualan senjata Inggris ke Arab Saudi dalam < Tradingeconomics.com> [diakses pada 24 September 2019]

- Dokumen United Nation Office for Disarmament Affairs. (2015). *Arms Trade Treaty Implementation Toolkit*, dalam <<https://www.un.org/disarmament>> [diakses tanggal 13 September 2018]
- Freeman, Sam Perlo. (2011). *Introduction to the Arms Trade*. London : Campaign Against Arms Trade
- Gov.uk. (2016). *PM seeks to turbo-charge trade between the UK and the Gulf*. dalam <<https://www.gov.uk/government/news/pm-seeks-to-turbo-charge-trade-between-the-uk-and-the-gulf>> [diakses pada 29 Agustus 2019]
- House of Common Committee, (2016). *The use of UK-Manufactured arms in Yemen*. UK : Authority of House of Common
- Human Right Watch, (2015). *Yemen: Coalition Used UK Cruise Missile in Unlawful Airstrike*. Dalam <<https://www.hrw.org/news/2015/11/25/yemen-coalition-used-uk-cruise-missile-unlawful-airstrike>>[diakses tanggal 10 Juli 2019]
- Human Right Watch. (2016). *Bombing Businesses : Saudi Coalition AirStrikes on Yemen's Civilian Economic Structures*. dalam <<https://www.hrw.org/report/2016/07/11/bombing-businesses/saudi-coalitionairstrikes-yemens-civilian-economic-structures>> [diakses pada tanggal 10 Juli 2019]
- Independent. (2018). *Saudi Arabia moving towards purchase of 48 Typhoon fighter jets from UK after Crown Prince visit*. dalam <<https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/saudi-arabia-uk-typhoon-jets-defence-mohammad-bin-salman-yemen-visit-williamson-a8247971.html>> [diakses 29 Agustus 2019]
- Kytömäki, E. (2015). *The Arms Trade Treaty and Human Security Cross-cutting Benefits of Accession and Implementation*. Chatham House: International Security Department The Royal Institute of International Affairs.
- Lambert, Mick et al. (2003). *The Political Influence of Arms Companies*. London : Campaign Against Arms Trade
- Louisa, Brooke Holland. (2019). “UK Arms Export to Saudi Arabia: Q&A”. *House of Common Library*. dalam <researchbriefings.files.parliament.uk > CBP-8425> [diakses tanggal 29 Juni 2019]
- Mark, Bromley; et al. (2016). *Dealing In Double Standard : How Arms Sales to Saudi Arabia are Causing Human Suffering in Yemen*. ATT Monitor
- Matelly, S. & Lima, M. (2016). *The influence of the state on the strategic choices of defence companies: the cases of Germany, France and the UK after the Cold War*. *Journal of Innovation Economics & Management*, dalam <<https://www.cairn.info/revue-journal-of-innovation-economics-2016.htm#>> [diakses 18 Agustus 2019]
- Noon, Lydia.(2019). *Brexit is Good News for Those in Business of War*. dalam <<https://www.opendemocracy.net/en/opendemocracyuk/brexit-is-good-news-for-those-in-business-of-war/>> [diakses tanggal 17 Agustus]
- Peace Pledge Union. (2019). *Alan Johnson faces protests as he addresses arms dealers' dinner*. Dalam <<https://ppu.org.uk/news/alan-johnson-faces-protests-he-addressesarms-dealers-dinner>> [diakses tanggal 17 Agustus 2019]
- Penjelasan mengenai tipe lisensi yang diberikan kepada perusahaan senjata yang dalam <<https://app.croneri.co.uk/questions-andanswers/standard-individual-export-licence-versus-open-individual-export-licence-what>> [diakses tanggal 10 Juli 2019]
- Penjelasan mengenai tipe lisensi yang diberikan kepada perusahaan senjata dalam <<https://www.gov.uk/government/statistics/strategic-export-controls-licensing-statistics-1-january-to-31-march-2015>> [diakses tanggal 10 Juli 2019]
- SIPRI. (2019). *Trends in International Arms Transfers, 2018*. dalam <https://www.sipri.org/files/fs_1903_at_2018> [diakses tanggal 22 Agustus 2019]

- Sky News. (2016). *Yemen's rebel PM accuses UK of War Crimes with Saudi Arabia Arms Sales*. Dalam <<https://news.sky.com/story/yemens-rebel-pm-accuses-uk-of-war-crime-s-with-saudi-arms-sales-10693334>> [diakses tanggal 11 Juli 2019]
- Stop War. (2017). *The Revolving Door Between the Government & the Arms Trade*. dalam <<http://www.stopwar.org.uk/index.php/news-comment/2720-the-revolving-door-between-the-government-the-arms-trade>> [diakses pada 30 Agustus 2019]
- The Business Insider. (2018). *Saudi Arabia's human rights nightmare continues with bombing of school bus in Yemen*, dalam <https://www.businessinsider.sg/saudi-arabia-yemen-school-bus-bombing-human-rights-2018-8/?r=US&IR=T> [diakses 15 September 2018]
- The Ferret. (2019). *Arms firms give MPs thousands of pounds, gifts and dinners*. dalam <<https://theferret.scot/arms-firms-politicians-hospitality-cash/>> [diakses tanggal 2 September 2019]
- The Guardian. (2015). *Revealed: how UK targets Saudis for top contracts* dalam <<https://www.theguardian.com/world/2015/oct/17/uk-courts-saudi-arabia-arms-sales>> [diakses 13 September 2018]
- The Guardian. (2016). *One in three Saudi air raids on Yemen hit civilian sites, data shows* 16 September, dalam <<https://www.theguardian.com/world/2016/sep/16/third-of-saudi-airstrikes-on-yemen-have-hit-civilian-sites-data-shows>> [diakses 15 September 2018]
- The Guardian. (2016). *What is happening in Yemen and how are Saudi Arabia's airstrikes affecting civilians – explainer* dalam <<https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2016/sep/16/how-saudi-arabias-airstrikes-have-hit-civilian-life-in-yemen>> [diakses 15 September 2018]
- The Guardian. (2017). *UK trade department draws half its secondees from arms industry*. dalam <<https://www.theguardian.com/world/2017/oct/08/uk-trade-department-draws-half-its-secondees-from-arms-industry>> [diakses tanggal 8 September 2019]
- The Reuters. (2018), *Saudi-led air strike kills 12 civilians, including seven children: medic's*, dalam <<https://www.reuters.com/article/us-yemen-security/saudi-led-air-strike-kills-12-civilians-including-seven-children-medics-idUSKCN1H90VB>> [diakses 13 September 2018]
- United Nations. (2013). *Arms Trade Treaty*, dalam <https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVI-8&chapter=26&clang=_en> [diakses 13 september 2018]
- Van Rij, Armida dan Benedict Wilkinson. (2018). *Security Cooperation with Saudi Arabia: Is it worth it for the UK?*. UK : Oxford Research Group
- Wearing, David. (2016). *A Shameful Relationship : UK Complicity in Saudi State Violence*. London : Campaign Against Arms Trade
- Wearing, David. (2018). *AngloArabia : Why the Gulf Wealth Matters to Britain?*. London : Polity Press